



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.7 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS AKUAKULTUR DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI AKUAKULTUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1760);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1761);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1249 Tahun 2021)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI AKUAKULTUR.

KESATU : Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

KEDUA : Unsur Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur meliputi:
a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan; dan

c. persyaratan jabatan.

KETIGA : Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a terdiri atas:

- a. nama jabatan;
- b. uraian/iktisar jabatan; dan
- c. kode jabatan.

KEEMPAT : Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

KELIMA : Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c terdiri atas:

- a. pangkat;
- b. kualifikasi pendidikan;
- c. jenis pelatihan;
- d. indikator kinerja jabatan; dan
- e. pengalaman kerja.

KEENAM : Kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis Akuakultur yang merupakan kategori keahlian terdiri atas:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan;
- b. pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;
- c. cara penanganan ikan yang baik;
- d. pengendalian peredaran pakan ikan;
- e. Perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan perlindungan usaha perikanan;
- f. perizinan usaha perikanan;

KETUJUH : Kompetensi teknis Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur

yang merupakan kategori keterampilan terdiri atas:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan;
- b. penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk ikan;
- c. pembinaan unit pembenihan ikan; dan
- d. penanganan ikan yang baik;

KEDELAPAN : Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf b terdiri atas:

- a. integritas;
- b. kerja sama;
- c. komunikasi;
- d. orientasi pada hasil;
- e. pelayanan publik;
- f. pengembangan diri dan orang lain;
- g. mengelola perubahan; dan
- h. pengambilan keputusan.

KESEMBILAN : Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf c yaitu perekat bangsa.

KESEPULUH : Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur menjadi acuan paling sedikit untuk:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penempatan;
- f. promosi dan/atau mutasi;
- g. uji kompetensi;
- h. sistem informasi manajemen; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*).

- KESEBELAS : Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA BELAS : Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Shi Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.7 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR DAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
AKUAKULTUR

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR DAN
TEKNISI AKUAKULTUR

Nama Jabatan : Analis Akuakultur
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-10-39-00-00-001

ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai	2.1 Mengingatnkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;

		nilai, norma, dan etika organisasi	<p>Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik.</p> <p>2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya.</p> <p>2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi</p>
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan	<p>2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang</p>

		respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	lain, serta memberikan respon yang sesuai; 2.3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	2.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi; 2.2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya; 2.3 Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	2.1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugastugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil; 2.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas

			<p>pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2.1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2.2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>2.3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	2.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan

			<p>yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2.2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;</p> <p>2.3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	2	<p>Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan</p>	<p>2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	<p>Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan</p>	<p>2.1 Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak fokus dalam perbedaan-perbedaan;</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam</p>

			<p>organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. Teknis			
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil</p>

			<p>perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan</p>
--	--	--	--

			standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
11. Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut	2	Mampu melaksanakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
12. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Sertifikasi CPIB	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas</p>

			perihal pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.
13. Pengendalian Peredaran Pakan Ikan	2	Mampu melaksanakan pengendalian peredaran pakan ikan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah dokumen Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan.</p>
14. Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan perlindungan	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya

<p>dan Usaha Perikanan</p>		<p>pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan</p>	<p>perikanan yang berwawasan lingkungan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2.3 Mampu berkoordinasi, melaksanakan kegiatan operasional, identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima</p>
----------------------------	--	---	---

			<p>bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
15. Perizinan Usaha Perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan perizinan usaha perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan mengidentifikasi, mengumpulkan mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, penangenaan sanksi</p>

		<p>administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahap penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, penangenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan dan pelabuhan</p>
--	--	--

			<p>perikanan, pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2.3 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka penerbitan pungutan perikanan dan izin usaha perikanan, pengenaan sanksi administrasi, pemantauan perizinan usaha, menyajikan data perizinan usaha, pengimplementasian sistem perizinan usaha, dan penanganan keluhan perizinan usaha perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta</p>
--	--	--	---

			<p>penanganan keluhan terkait dengan perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha perikanan, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan untuk usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>		
II. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Berijazah minimal sarjana atau diploma empat	√		
	2 Bidang Ilmu	<p>a. Perikanan Budidaya, Sumber Daya Perairan, Ilmu Lingkungan, Biologi, Kimia bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS;</p> <p>b. Perikanan Budidaya / Sumber Daya Perairan / Ilmu Lingkungan / Biologi / Kimia atau bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain</p>			
B. Pelatihan	PNS 1. Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√

	2 Teknis	1. Cara Pembenihan Ikan yang Baik 2. Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik 3. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	PPPK 1. Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
C. Pengalaman kerja		PNS a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS; b. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas Analis Akuakultur, untuk	√	-	-

	pengangkatan selain CPNS			
	PPPK Pengalaman minimal 2 tahun di bidang kelautan dan perikanan	√		
D. Pangkat	PNS Paling rendah Penata Muda, III/a			
	PPPK -			
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas data dan informasi yang disediakan terkait dengan kegiatan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.			

Nama Jabatan : Analis Akuakultur
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-09-39-00-00-001

ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3. 1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3. 2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3. 3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif	3. 1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,

		membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	membentuk tim yang tepat, 3. 2 Mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 3. 3 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 3. 4 3.3.Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	3. 1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain; 3. 2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;

			3. 3 Membuat laporan tahunan/ periodik/naskah/ dokumen/ proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap;
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3. 1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi; 3. 2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 3. 3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5 Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3. 1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap 3. 2 unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;

			<p>3. 3 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan caracara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3. 4 Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/ masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3. 1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3. 2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan</p>

			<p>diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3. 3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan , mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3. 1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan.</p> <p>3. 2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3. 3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak</p>

			negatif dari konflik atau potensi konflik
C. Teknis			
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan	3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p>

			<p>3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
11. Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut	3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan	3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pengelolaan pembenihan

		<p>pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut</p>	<p>ikan air tawar, air payau, dan laut ;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
<p>12. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)</p>	<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Sertifikasi CPIB</p>	<p>3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan</p>

			penerapam Sertifikasi CPIB.
13. Pengendalian Peredaran Pakan Ikan	3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengendalian peredaran pakan ikan	<p>2.4. Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>2.5. Mampu mensosialisasikan Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>2.6. Mampu memecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan dalam proses</p>

			pengendalian peredaran pakan ikan.
14. Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan	3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>3.1 Mampu mengidentifikasi persoalan mendesain dan merancang instrumen, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders;</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi,</p>

			asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.
15. Perizinan Usaha Perikanan	3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perizinan usaha perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan perizinan usaha perikanan</p>

			<p>dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan</p>
--	--	--	--

			(penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan.
--	--	--	--

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Berijazah minimal sarjanan atau diploma empat	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya / Sumber Daya Perairan / Ilmu Lingkungan / Biologi / Kimia atau bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi			

B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	1. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 3. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	
	PPPK 1. Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
C. Pengalaman kerja	PNS Pengalaman Minimal 2 tahun di bidang tugas Analisis Akuakultur		√		
	PPPK		√		

	Pengalaman Minimal 2 tahun di bidang kelautan dan perikanan			
D. Pangkat	PNS Paling rendah Penata, III/c			
	PPPK -			
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas hasil analisis pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.			

Nama Jabatan : Analis Akuakultur
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-08-39-00-00-001

ANALIS AKUAKULTUR AHLI MADYA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan analisis hasil kegiatan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4. 1 Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4. 2 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4. 3 Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja

			setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	<p>4. 1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;</p> <p>4. 2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4. 3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>4. 1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4. 2 Menuangkan pemikiran/ konsep yang multidimensi</p>

			<p>dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4. 3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	<p>Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya</p>	<p>4. 1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4. 2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4. 3 Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi</p>
5. Pelayanan Publik	4	<p>Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau</p>	<p>4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak</p>

		kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi; 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok
6 Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembang jangka panjang dalam rangka	4. 1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan,

		mendorong manajemen pembelajaran	<p>bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4. 2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4. 3 Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4. 1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4. 2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4. 3 Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung	4. 1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah

		<p>risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko</p>	<p>yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.</p> <p>4. 2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4. 3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)</p>
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	4	<p>Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi</p>	<p>4. 1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan</p>
C. Teknis			
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan	4	<p>Mampu mengarahkan, memerintahkan, mengevaluasi, dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen</p>	<p>4.1.Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana</p>

		<p>pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana</p>
--	--	--	---

			<p>dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi</p>
--	--	--	--

			dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
11. Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.</p>

<p>12. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)</p>	<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur Sertifikasi CPIB</p>	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja Sertifikasi CPIB;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan Sertifikasi CPIB;</p> <p>4. 3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Sertifikasi CPIB dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Sertifikasi CPIB;</p>
<p>13. Pengendalian Peredaran Pakan Ikan</p>	<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengendalian peredaran pakan ikan</p>	<p>3.1. Mampu melakukan terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan proses pengendalian peredaran pakan ikan yang lebih efektif;</p> <p>3.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan</p>

			<p>norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengendalian peredaran pakan ikan;</p> <p>3.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan pengendalian peredaran pakan ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengendalian peredaran pakan ikan.</p>
14. Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,</p>

			<p>dan kriteria instrumen pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor</p>
--	--	--	---

			kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.
14. Perizinan Usaha Perikanan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan</p>

			<p>norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, penerapan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan,</p>
--	--	--	---

			<p>analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan,</p>
--	--	--	---

			penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Berijazal minimal sarjanan atau diploma empat	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya / Sumber Daya Perairan / Ilmu Lingkungan / Biologi / Kimia atau bidang ilmu lainnya yang ditentukan oleh instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi			
B. Pelatihan	PNS 1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	1. Asesor Cara Pembenihan Ikan yang Baik 2. Asesor Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik 3. Aseseor Cara Pembuatan Pakan yang Baik 4. Pelatihan teknis lainnya yang	-	√	-

		dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	PPPK 1. Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	Pelatihan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	3. Fungsional	Pelatihan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
C. Pengalaman kerja	PNS Pengalaman minimal 2 tahun di bidang tugas Analis Akuakultur		√	-	-
	PPPK Pengalaman minimal 2 tahun di bidang kelautan dan perikanan		√		
D. Pangkat	PNS Paling rendah Pembina, IV/a				
	PPPK -				
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas dokumen kajian teknis analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan				

	<p>pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.</p>
--	--

Nama Jabatan : Analis Kuakultur
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-07-39-00-00-001

ANALIS AKUAKULTUR AHLI UTAMA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Menyusun rekomendasi teknis terkait kegiatan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	5	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	5.1 Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. 5.2 Menjadi “role model” /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. 5.3 Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan

			norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	<p>4. 1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;</p> <p>4. 2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4. 3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/ semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>4. 1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4. 2 Menuangkan pemikiran/ konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p>

			4. 3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4. 1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4. 2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4. 3 Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi</p>
5 Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan	4. 1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan

		<p>pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional</p>	<p>publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4. 2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>4. 3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok</p>
<p>6 Pengembangan diri dan orang lain</p>	<p>4</p>	<p>Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka</p>	<p>4. 1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan penugasan dan pengalaman lainnya,</p>

			<p>serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4. 2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4. 3 Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya</p>
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	<p>5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri.</p> <p>5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang,</p>

			<p>agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang</p> <p>5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional</p>
C. Teknis			
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan	5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan</p>

			<p>di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder, dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta</p>
--	--	--	---

			perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
11. Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
12. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan sertifikasi CPIB serta

		kebijakan yang menjasi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah sertifikasi CPIB	pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan sertifikasi CPIB serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam sertifikasi CPIB.
13. Pengendalian Peredaran Pakan Ikan	5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian peredaran pakan ikan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengendalian peredaran pakan ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian peredaran pakan ikan dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam impelentasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam

			pengendalian peredaran pakan ikan.
14. Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan	5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan dalam pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya</p>

			peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.
15. Perizinan Usaha Perikanan	5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perizinan usaha perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutanya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan,</p>

			<p>pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait dengan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi,</p>
--	--	--	---

			implementasi sistem, integrasi dan pengolahan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan perlabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta perhitungan dan validasi pungutan.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Berijazah minimal sarjana atau diploma empat	√		1
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya, Sumber Daya Perairan, Ilmu Lingkungan, Biologi, Kimia atau bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari Jabatan lain dan promosi			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	1. Asesor Cara Pembenihan Ikan yang Baik	-	√	-

		2. Asesor Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik 3. Aseseor Cara Pembuatan Pakan yang Baik 4. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	
C. Pengalaman kerja		Minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas Analis Akuakultur	√	-	-
D. Pangkat		Pembina Utama Madya, IV/d			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas dokumen rekomendasi kebijakan teknis untuk perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya.			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.7 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
AKUAKULTUR DAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI AKUAKULTUR

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI AKUAKULTUR

Nama Jabatan : Teknisi Akuakultur
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-14-39-00-00-002

TEKNISI AKUAKULTUR PEMULA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	1	Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi	1.1 Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta; 1.2 Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-

			<p>hari, pada tataran individu/pribadi;</p> <p>1.3 Tidak menjanjikan/ memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi.</p>
2. Kerjasama	1	Berpartisipasi dalam kelompok kerja	<p>1.1 Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas/bagiannya, dan mendukung keputusan tim;</p> <p>1.2 Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim;</p> <p>1.3 Mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas</p>
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	<p>1.1 Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;</p> <p>1.2 Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan</p> <p>1.3 Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.</p>
4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung	<p>1.1 Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan;</p>

		jawab untuk memenuhi standar kerja	<p>1.2 Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP).</p> <p>1.3 Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya</p>
5 Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.	<p>1.1 Mampu mengerjakan tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>1.2 Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan;</p> <p>1.3 Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan Diri	<p>1.1 Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan;</p> <p>1.2 Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari</p>

			<p>keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran;</p> <p>1.3 Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.</p>
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	<p>1.1 Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut;</p> <p>1.2 Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/ pedoman;</p> <p>1.3 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.</p>
8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	<p>1.1 Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi.</p> <p>1.2 Mengenali situasi/ pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan.</p> <p>1.3 Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.</p>
B Sosial Kultural			

9. Perekat Bangsa	1	Peka memahami dan menerima kemajemukan	<p>1.1 Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;</p> <p>1.2 Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan/kemajemukan masyarakat;</p> <p>1.3 Mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengan-nya.</p>
-------------------	---	--	---

C. Teknis

10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budaya Perikanan	1	Mampu memahami konsep dasar, metode, peraturan, dan tata cara prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, dan tata cara perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan</p>
---	---	---	--

			pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.
11. Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk	1	Memahami konsep dasar, peraturan, dan prosedur penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk.</p>
12. Pembinaan Unit Pembenihan Ikan	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Pembinaan Unit Pembenihan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/ stakeholder terkait kebijakan</p>

			pembinaan unit pembenihan		
13. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Sertifikasi CPIB	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder teknik penerapan Sertifikasi CPIB.</p>		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A Pendidikan	1 Jenjang	SMK / SUPM	√		
	2 Bidang Ilmu	a. Perikanan Budidaya, Kimia, Farmasi bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS; b. Perikanan Budidaya, Kimia Farmasi atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.			
B. Pelatihan	PNS 1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	1. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CBIB)	-	√	-

		2. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	PPPK 1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	Pelatihan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	3 Fungsional	Pelatihan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
C. Pengalaman kerja		a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS; b. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang pengelolaan perikanan budidaya, untuk pengangkatan selain CPNS	√	-	-
	PPPK		√		

	Pengalaman minimal 2 tahun di bidang kelautan dan perikanan			
D. Pangkat	PNS Paling rendah Pengatur Muda, II/a			
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas layanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.			

Nama Jabatan : Teknisi Akuakultur
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-13-39-00-00-002

TEKNISI AKUAKULTUR TERAMPIL			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/keompok kerjanya. 2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang	2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

		partisipatif dan efektif	<p>mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. tugas rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	<p>1.1 Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;</p> <p>1.2 Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/ diberikan</p> <p>1.3 Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.</p>
4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja	<p>1.1 Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan;</p> <p>1.2 Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP).</p>

			1.3 Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya
5 Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan	<p>1.1 Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>1.2 Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan;</p> <p>1.3 Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	<p>1.1 Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan;</p> <p>1.2 Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran;</p> <p>1.3 Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang</p>

			lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	1.1 Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut; 1.2 Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman; 1.3 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.
8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	1.1 Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. 1.2 Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. 1.3 Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1 Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak fokus dalam perbedaan-perbedaan; 2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;

			<p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. Teknis			
<p>10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan</p>	2	<p>Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>

<p>11. Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk</p>	<p>1</p>	<p>Memahami konsep dasar, peraturan, dan prosedur penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk</p>	<p>1.4 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>1.5 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>1.6 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk.</p>
<p>12. Pembinaan Unit Pembenihan Ikan</p>	<p>1</p>	<p>Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Pembinaan Unit Pembenihan</p>	<p>1.4 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.5 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.6 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/ stakeholder terkait kebijakan pembinaan unit pembenihan</p>
<p>13. Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan</p>	<p>1</p>	<p>Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyediaan bahan</p>	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme dan tata cara proses penyediaan bahan</p>

		baku pakan ikan dan pakan ikan	<p>baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder secara tepat terkait penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.</p>
14. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Sertifikasi CPIB	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder teknik penerapan Sertifikasi CPIB.</p>
15. Rehabilitasi Lingkungan Budidaya	1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tata cara prosedur investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan investigasi</p>

			<p>kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budaya;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholders</i> secara tepat tentang investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budaya.</p>		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A Pendidikan	1 Jenjang	<p>a. Berijazah diploma tiga untuk pengangkatan melalui Calon PNS D-III</p> <p>b. Minimal SMK / SUPM, pengangkatan selain CPNS</p>	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	<p>a. Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS dan PPPK;</p> <p>b. Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan atau bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina, untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain</p>			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai			√

		dengan kebutuhan jabatan			
	2 Teknis	3. Cara Pembudiyayaan Ikan yang Baik (CPIB) 4. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	PPPK 1. Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	Pelatihan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	3. Fungsional	Pelatihan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
C. Pengalaman kerja		PNS a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS; b. Minimal 2 tahun di bidang	√	-	-

	<p>pengelolaan perikanan budidaya, untuk pengangkatan selain CPNS</p>			
	<p>PPPK Pengalaman Minimal 2 tahun di bidang kelautan dan perikanan</p>	√		
D. Pangkat	<p>PNS Paling rendah Pengatur, II/c</p>			
	<p>PPPK -</p>			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<p>Kualitas bahan layanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.</p>			

Nama Jabatan : Teknisi Akuakultur
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-12-39-00-00-002

TEKNISI AKUAKULTUR MAHIR			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1 Mengingatn rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/keompok kerjanya. 2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya

			sesuai dengan etika organisasi
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal ; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	<p>2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> <p>2.3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan</p>
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari	2.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi

		standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	dari standar kerja yang ditetapkan organisasi; 2.2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya; 2.3 Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	2.1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugastugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil; 2.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap; 2.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal

			penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
6 Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2.1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2.2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>2.3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2.2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;</p> <p>2.3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai,	2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman

		menekankan persamaan dan persatuan	dan menghargai perbedaan; 2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
B Sosial Kultural			
9. Perikat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1 Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak fokus dalam perbedaan-perbedaan; 2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi,

			preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
C. Teknis			
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan	2.1 Mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis; 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.
11. Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk	2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data Penataan pemasukan benih,	2.4. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk

		calon induk, dan induk	<p>pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ;</p> <p>2.5. Mampu menganalisis dan menyajikan data penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>2.6. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal data penataan pemasuk benih ikan hidup.</p>
12. Pembinaan Unit Pembenihan Ikan	2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data Pembinaan Unit Pembenihan ;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan</p>
13. Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	2	Mampu melaksanakan penyediaan bahan baku pakan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.7. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>2.8. Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan bahan baku</p>

			<p>pakan ikan; Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan bahan baku pakan ikan;</p> <p>2.9. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penyediaan bahan baku pakan kepada masyarakat dan stakeholder.</p>		
14. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Sertifikasi CPIB	<p>2.4. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.5. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.6. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.</p>		
II. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Berijazah SMK / SUPM/D-III	√	-	-

	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan atau bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain			
B. Pelatihan	PNS 1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan	-		√
	2 Teknis	1. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) 2. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	PPPK 1. Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	2. Teknis	Pelatihan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai			√

		dengan jenjang jabatan			
C. Pengalaman kerja	PNS	Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan perikanan budidaya	√	-	-
	PPPK	Minimal 2 tahun di bidang kelautan dan perikanan	√		
D. Pangkat	PNS	Paling rendah Penata Muda, III/a			
	PPPK	-			
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas analisis layanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.				

Nama Jabatan : Teknisi Akuakultur
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-11-39-00-00-002

TEKNISI AKUAKULTUR PENYELIA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif	3.1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,

		<p>membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi</p>	<p>membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal;</p> <p>3.2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja;</p> <p>3.3 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.</p>
3. Komunikasi	3	<p>Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks</p>	<p>3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;</p> <p>3.3 Membuat laporan tahunan/</p>

			<p>periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap;</p>
4. Orientasi pada hasil	3	<p>Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja</p>	<p>3.1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;</p> <p>3.2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;</p> <p>3.3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.</p>
5 Pelayanan Publik	3	<p>Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja</p>	<p>3.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;</p> <p>3.2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas</p>

			<p>organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3.3 Mengimplementasikan caracara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3.1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3.2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan</p>

			<p>dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3.3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>
B Sosial Kultural			
9. Perikat Bangsa	3	Mempromosikan, engembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan.</p> <p>3.2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku.</p> <p>3.3 Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.4 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik</p>

C. Teknis			
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budaya Perikanan	3	Mampu menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan	<p>3.5. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;;</p> <p>3.6. Mampu mensosialisasikan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis; Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan;</p>

			<p>3.7. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
<p>11. Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk</p>	<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk</p>	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penataan pemasukan ikan hidup;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penataan pelaksanaan pemasukan benih ikan hidup.</p>

<p>12. Pembinaan Unit Pembenihan Ikan</p>	<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan</p>	<p>3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan pelaksanaan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan Pembinaan Unit Pembenihan ;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan .</p>
<p>13. Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan</p>	<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan</p>	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penyediaan bahan baku pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di</p>

			lingkungannya dalam melaksanakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan; 3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan.
14. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Sertifikasi CPIB	2.7. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi CPIB; 2.8. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerapan Sertifikasi CPIB; 2.9. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.
15. Perizinan Usaha Perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan perizinan usaha perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis perizinan usaha perikanan	4.1. Mampu melaksanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan data dan informasi untuk penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan

			<p>pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.2. Mampu melaksanakan tahapan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian</p>
--	--	--	--

			<p>kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.3. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka penerbitan pungutan perikanan dan izin usaha perikanan, pengenaan sanksi administrasi, pemantauan perizinan usaha, menyajikan data perizinan usaha, pengimplementasian sistem perizinan usaha, dan penanganan keluhan perizinan usaha perikanan;</p> <p>4.4. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan,</p>
--	--	--	--

			penerapan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha perikanan, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan untuk usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder.
--	--	--	---

II. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	SMK / SUPM /berijazah paling rendah D-III	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan alam atau bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi pembina untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai	-	√	-

		dengan kebutuhan jabatan			
	2 Teknis	3. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) 4. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	PPPK 1.Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2.Teknis	Pelatihan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	3.Fungsional	Pelatihan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
C. Pengalaman kerja		PNS Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan perikanan budidaya	√	-	-
		PPPK Pengalaman Minimal 2 tahun di bidang kelautan dan perikanan	√		

D. Pangkat	PNS Paling rendah Penata, III/c
	PPPK -
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas analisis Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS